

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Covid-19 yang mulai mempengaruhi dunia ini pada tahun 2019 belum berhenti dan telah menarik perhatian orang di seluruh dunia. COVID-19 telah diklasifikasikan sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) per 30 Januari. (Dong et al., 2020). Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, khususnya Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), COVID-19 dapat menginfeksi saluran pernapasan dan menyebabkan konsekuensi yang dapat berkisar dari kasus flu sedang hingga yang cukup serius (Kirigia & Muthuri, 2020). Jumlah kasus COVID-19 meningkat dengan cepat dan telah menyebar melintasi perbatasan internasional. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2021), per 24 Oktober 2021, Pemerintah Republik Indonesia melaporkan 4.240.019 orang terkonfirmasi positif COVID-19, 143.205 kematian (CFR: 3,4%) terkait COVID-19, dan 4.082.454 pasien telah sembuh dari penyakit tersebut.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah Langkah dan kebijakan strategi untuk memerangi pandemi COVID-19, salah satunya mensosialisasikan gerakan *social distancing* kepada masyarakat dalam upaya untuk memutus mata rantai penularan pandemi COVID-19. Gerakan *social distancing* mengamanatkan agar orang menjaga jarak setidaknya 2 meter antara

satu sama lain, menghindari kontak mata, dan menghindari kerumunan besar (Buana, 2020). Adanya kebijakan tersebut membuat proses penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian pun terganggu akibat adanya pembatasan aktivitas masyarakat atau social distancing. Kegiatan penyuluhan pertanian yang dilakukan penyuluh pertanian lapangan (PPL) pun terganggu, karena tidak dapat melakukan kegiatan penyuluhan dengan cara mengumpulkan massa dan dikhawatirkan dapat menjadikan cluster penularan covid-19.

Kebijakan terkait pembatasan kegiatan penyuluhan pertanian juga telah diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019. Adanya pembatasan kegiatan Penyuluhan pertanian akibat adanya pandemi covid-19 tersebut sangat mempengaruhi terhadap kinerja penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam melaksanakan proses penyuluhan ke petani. Petani semakin sedikit mendapatkan penyuluhan pertanian dari penyuluh pertanian lapangan (PPL). Kegiatan penyuluhan pertanian pertanian padahal sangat diperlukan bagi petani agar dapat merubah perilaku petani agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam program pembangunan pertanian untuk dapat mengatasi permasalahan sosial yang mereka hadapi sebagai usaha agar dapat meningkatkan produktivitas usahatani (Bahua, 2016).

Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) saat ini dapat dikatakan kurang baik akibat adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan melakukan penyuluhan pertanian kepada petani sebagai akibat diberlakukannya kebijakan

pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Kebijakan pembatasan tersebut mengakibatkan kegiatan penyuluhan pertanian pun terhambat dan berkurang intensitasnya. Adanya kebijakan tersebut juga membuat penyuluh pertanian lapangan (PPL) diharuskan untuk dengan cepat menyesuaikan upaya dan metode penyampaian program penyuluhan untuk menanggapi kebutuhan petani selama pandemi covid-19. Menurut Wijaya et al (2019), menyatakan penyuluh pertanian memiliki peranan penting sebagai ujung tombak serta jembatan antara pemerintah dan petani sebagai pelaku utama sehingga dituntut memiliki pengetahuan, informasi yang memadai untuk petani dan kemampuan untuk akses dan tanggap terhadap perkembangan teknologi.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meminta seluruh penyuluh pertanian di setiap provinsi untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan pertanian di masa *new normal*. Menteri Pertanian RI juga mengimbau penyuluh pertanian untuk lebih aktif mendukung petani di masa pandemi dan transisi ke *new normal* (Syahyuti, 2021). Adanya himbauan tersebut membuat proses penyuluhan pertanian harus tetap berjalan walaupun di masa pandemi covid-19 ini. Penyuluh pertanian lapangan (PPL) saat ini masih mencari strategi terbaik yang dipilih agar informasi yang seharusnya dapat tersampaikan kepada petani dapat diterima dengan baik dan dapat diaplikasikan oleh kelompok tani dan anggotanya.

Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Pematang Punjung pun ikut terkena imbas dari adanya pandemi covid-19 dengan adanya pemberlakuan pembatasan

kegiatan masyarakat (PPKM). Kebijakan tersebut mengakibatkan kegiatan penyuluhan pertanian di Kabupaten Pematang Jaya juga ikut terganggu sejak tahun 2020 hingga saat ini. Proses penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh penyuluh pertanian menjadi terganggu sebab tidak dapat melakukan pertemuan dengan menghadirkan banyak masa di situasi pandemi Covid-19 saat ini. Menurut Indraningsih (2020), Mayoritas pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dilakukan secara daring atau online selama pandemi Covid-19. Penyuluhan secara daring atau online tersebut menggunakan aplikasi pesan WhatsApp, media elektronik berupa telepon/HP, layanan pesan singkat (SMS), dan media sosial lainnya semuanya digunakan dalam konseling online. Selain itu, jika akan dilaksanakan penyuluhan secara langsung atau kunjungan dengan petani, maka penyuluhan pertanian akan dilakukan secara perorangan atau melalui perwakilan dari kelompok tani terkait. Suadnya (2021), menyatakan bahwa komunikasi perorangan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media telepon seluler atau *handphone* (HP) merupakan pendekatan komunikasi yang dipilih oleh penyuluh ketika menyampaikan pesan kepada petani dalam bentuk materi penyuluhan (HP).

Dinas Pertanian Kabupaten Pematang Jaya memiliki 8 (delapan) unit kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang tersebar di (delapan) kecamatan. Setiap 1 (satu) kecamatan terdapat 1 (satu) unit Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Salah satu Balai Penyuluhan pertanian (BPP) yang ikut terpengaruh akibat adanya pandemi covid-19 yaitu Balai Penyuluhan pertanian (BPP) Kecamatan Pematang Jaya. Kegiatan atau proses penyuluhan pertanian di BPP

Kecamatan dibatasi aktifitasnya, seperti kegiatan penyuluhan yang mendatangkan massa yang banyak dilarang untuk dilakukan. Kegiatan penyuluhan pun dibatasi jumlah atau intensitas pelaksanaannya. Selain itu jumlah peserta penyuluhan atau petani juga dibatasi jumlahnya. Akibat adanya pandemic covid-19 tersebut Kegiatan penyuluhan yang mengumpulkan banyak masa harus terpaksa dikurangi jumlah pesertanya saja agar tidak melanggar aturan protokol kesehatan COVID-19 yang telah ditentukan. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana gambaran penyuluhan pertanian di BPP Kecamatan Pematang di masa pandemi covid-19, metode penyuluhan yang digunakan disaat pandemic covid, hambatan serta solusi yang diambil oleh penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan dan strategi inovasi yang diambil penyuluh untuk melakukan penyuluhan di masa pandemi covid-19.

## **B. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah dari proposal penelitian ini adalah :

1. Bagaimana karakteristik informan penelitian penyuluhan pertanian di masa pandemi Covid-19 di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Pematang ?
2. Bagaimana kondisi penyuluhan pertanian di masa pandemi Covid-19 di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Pematang ?
3. Bagaimana metode penyuluhan pertanian yang dilakukan penyuluh pada petani di masa pandemi Covid-19 di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Pematang ?

4. Bagaimana hambatan yang dihadapi penyuluh dan solusi dalam melakukan kegiatan penyuluhan pertanian di masa pandemi Covid-19 di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Pematang ?
5. Bagaimana strategi atau inovasi yang dilakukan penyuluh pertanian dalam melaksanakan penyuluhan pertanian dimasa pandemi Covid-19 di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Pematang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari pembuatan proposal penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan karakteristik informan penelitian penyuluhan pertanian di masa pandemi Covid-19 di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Pematang ?
2. Untuk mendeskripsikan kondisi penyuluhan pertanian di masa pandemi Covid-19 di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Pematang ?
3. Untuk mendeskripsikan metode penyuluhan pertanian yang dilakukan penyuluh pada petani di masa pandemi covid-19 di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Pematang
4. Untuk mendeskripsikan hambatan yang dihadapi penyuluh dan solusi dalam melakukan penyuluhan pertanian di masa pandemi covid-19 di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Pematang.
5. Untuk mendeskripsikan strategi atau inovasi yang dilakukan penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan pertanian dimasa pandemi covid-19 di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Pematang ?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari proposal penelitian ini yaitu :

1. Manfaat bagi penulis yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis serta sebagai syarat untuk dapat menyelesaikan studi di program studi Agribisnis Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
2. Manfaat bagi pemerintah atau pihak terkait yaitu untuk memberikan informasi agar pelaksanaan penyuluhan pertanian apakah berjalan dengan baik dan lancar serta sebagai sarana untuk mengambil tindakan dan kebijakan terkait program penyuluhan pertanian yang perlu diterapkan kedepannya.
3. Manfaat bagi masyarakat secara umum yaitu untuk memberikan informasi terkait penyuluhan pertanian di masa pandemi covid-19 dilakukan.

#### **E. Pembatasan Masalah dan Asumsi**

Pembatasan masalah dan asumsi pada penelitian ini adalah :

1. Lokasi penelitian dilakukan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah.
2. Penelitian difokuskan kepada kegiatan penyuluhan pertanian di masa pandemic covid-19 di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kabupaten Pemalang.

3. Penelitian dilakukan dengan menggali informasi mendalam terhadap Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Balai Penyuluhan (BPP) Kabupaten Pematang.
4. Penelitian dilakukan Selama 6 (enam) bulan (September 2021 – Maret 2022).
5. Durasi pengambilan data dilakukan pada masa pandemi covid-19 ( 2019 – Sekarang).

